

KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA SINDANGSARI KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS

Pipik Ropikoh¹, R. Didi Djadjuli², Supri³

Universitas Galuh^{1,2,3}

E-mail : Pipikropikoh1@gmail.com

ABSTRACT

This research was motivated by the non-optimal performance of the Government in the physical development program in Sindangsari Village, Kawali District, Ciamis Regency, this can be seen from the following indicators: the lack of punctuality of the Village Government in completing the village's physical development, the lack of community satisfaction with the performance of the Village Government. In this study the authors used a qualitative descriptive research method. The technique used by the author in this research is library research and field studies which consist of observation and interviews. As for the informants in this study were as many as 6 people. The performance of the Village Government in the physical development program in Sindangsari Village, Kawali District, Ciamis Regency, based on research results, is known to have not run optimally, in the productivity dimension where the lack of timeliness of the Village Government in completing physical development. In the responsiveness dimension where the community feels dissatisfied with the results of the work that has been carried out by the Village Government which causes delays in community activities. The efforts that must be made are conducting outreach to the community regarding the importance of community participation in development so that development can be completed in accordance with a predetermined time management, and asphaltting of the road is not only patched in the potholes, but also the entire road is repaired with hot mix asphalt to used and felt by the community in a long period of time.

Keywords: *Performance, Village Government, Developmen*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini organisasi dalam pengembangan dan kemajuan selalu mengedepankan sumber daya manusianya. Organisasi bisa dipandang sebagai wadah juga proses karena mempunyai tempat untuk melakukan aktivitas pengorganisasian oleh anggota organisasi itu sendiri.

Indonesia memiliki sistem

Pemerintahan demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat memiliki kebebasan dalam menyampaikan melalui sosial media ataupun secara langsung. Dalam era reformasi ini sekarang membuka jalan bagi setiap daerah untuk menunjukkan daerahnya sendiri. Jika menyoroti dari sumber daya manusia yang ada, bisa dikatakan

bahwa Indonesia sebenarnya mempunyai sumber daya manusia yang sangat besar. Namun kualitas sumber daya manusianya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini yang bisa menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pembangunan. Dapat kita lihat seperti tenaga-tenaga ahli yang kebanyakannya di datangkan dari luar Negeri. Mengenai sumber daya alam sebenarnya bangsa kita mempunyai sumber daya alam yang sangat besa, namun kita tidak bisa mengolahnya sehingga membutuhkan Kerjasama dengan perusahaan dari luar negeri. Dengan demikian sumber daya alam yang seharusnya dapat kita manfaatkan untu kemakmuran rakyat tidak bisa maksimal karena keuntungannya harus dibagi dengan pihak kedua.

Suatu Desa tentu memiliki keberagaman yang berbeda dengan Desa yang lainnya, keberagaman desa dapat dilihat dari potensi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun dari potensi Sumber Daya Alam (SDA). Beragam perbedaan diantaranya ada desa yang sangat potensial, ada pula yang memiliki kepadatan dan jumlah penduduk yang kurang, ada yang tingkat pendapatannya tinggi dan ada pula yang tingkat pendapatannya rendah, adanya fasilitas desa yang memadai dan ada juga ketersediaan pembangunan yang kurang memadai, dan beragam karakteristik lainnya. Sedangkan sumber pendanaan Pemerintah Desa bersumber dari APBDes, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan di pertanggung jawabkan kepada BPD , Provinsi (Gubernur) dan Bupati.

Kinerja merupakan suatu keberhasilan dalam sebuah organisasi selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas yang dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau berbagai kemungkinan lain yang telah disepakati bersama. Kinerja juga dikatakan sebagai pelaksanaan suatu pekerjaan dan penyempurnaan pekerjaan sesuai dengan tanggungjawabnya sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yangdiharapkan.

Pembangunan bisa dikatakan sebagai upaya terprogram danterencana terencana yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Pelaku utama dalam pembangunan yaitu Pemerintah dan dibantu oleh masyarakat. Maka pelaksanaan pembangunan tidak hanya dibebankan ooleh Pemerintah saja akan tetapi masyarakat juga ikut berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah mempunyai peran dalam pembangunan yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas. Maka peran masyarakat yaitu turut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan baik itu dalam bentuk sumbangsih, pikiran, maupun tenaga. Pemerintah dengan masyarakat harus saling bekerja sama agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pembangunan fisik merupakan perwujudan yang nyata dari pembangunan segi non-fisik yang meliputi sosial ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Pembangunan fisik merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh suatu

pemerintahan, bangsa dan negara dengan memiliki maksud mengadakan kegiatan kearah yang lebih baik dan perubahan yang dapat dilihat secara nyata dan konkrit. Perubahan tersebut identic dengan adanya bentuk dan wujud dari pembangunan, misalnya sarana kantor Desa, sarana Pendidikan, sarana tempat beribadah, dan sarana yang lainnya.

Desa adalah sekumpulan keluargayang menerapkan sistem Pemerintahan sendiri yang diketuai oleh Kepala Desa. Suatu Desa tentunya memiliki keunggulan dan keragaman yang terus dijaga dengan baik agar bisa dinikmati oleh generasi penerus. Maka dari itu Desa perlu mendapatkan pemberdayaan dan juga perhatian yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dan juga oleh Pemerintah pusat. Desa mempunyai kewenangannya sendiri dalam mengatur dan memajukan pembangunan yang ada di desanya sendiri yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul diatur dan diurus oleh desa. Dengan hal ini desa memiliki wewenang dalam memajukan desanya sendiri berdasarkan kesepakatan desa yang ada.

Pemerintah yang baik dapat terselenggara karena adanya partisipasi masyarakat yang peduli dan sadar terhadap pentingnya pembangunan khususnya di Desa yang memiliki tujuan dalam memperbaiki hidup masyarakat yang lebih baik. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kesempatan

Desa untuk melakukan pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat agar Desa tersebut berkembang cepat. Dari penjelasan yang telah di sebutkan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembangunan selalu diukur oleh keberhasilan Desa dalam pembangunan pemberdayaan serta dukungan dari masyarakat.

Werther dan Davis (Notoatmojo 2009:96) dalam menentukan kebutuhan dari segi kualitas sumber daya manusia (aparatur desa), diperlukan perencanaan sumber daya manusia yang merupakan inti administrasi sumber daya manusia karena sumber daya manusia merupakan suatu perkurangan tentang kebutuhan atau pasokan tenaga kerja sehingga jumlah dan tipe kebutuhan dapat terencana dengan baik. Sumber daya manusia dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan manusia seperti kompetisi atau kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya di Desa Sindangsari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

Desa Sindangsari merupakan desa yang berada di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Berdasarkan fakta di lapangan, Kinerja Pemerintah Desa Sindangsari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis masih memiliki kelemahan dalam kinerja Pemerintah Desa yang dirasakan oleh masyarakat Desa Sindangsari masih kurang maksimal, sehingga kebutuhan dan keinginan masyarakat masih belum terpenuhi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, ditemui

beberapa indikator masalah, antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya ketepatan waktu Pemerintah Desa dalam menyelesaikan pembangunan fisik.
2. Kurangnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa. Hal ini ditandai dengan pengaspalan jalan yang dilakukan di tahun 2021 kini telah rusak kembali. Sehingga menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi terhambat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kinerja Pemerintah Desa Dalam Program Pembangunan Fisik Di Desa Sindangsari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis ?”

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 orang, yang terdiri dari Kepala Desa Sindangsari, Sekretaris Desa Sindangsari, ketua BPD Desa Sindangsari, dan 3 orang tokoh masyarakat. Kemudian setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun untuk mengetahui kinerja Pemerintah Desa dalam program pembangunan fisik di Desa

Sindangsari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis berdasarkan teori yang disampaikan oleh Dwiyanto (Pasalong 2019:206-208) tentang mengukur kinerja pegawai, yakni :

1. Produktivitas;
2. Kualitas layanan;
3. Responsivitas;
4. Responsibilitas; dan
5. Akuntabilitas.

Untuk penjelasan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :

1. Produktivitas

a. Kemampuan Pemerintah Desa dalam menyelesaikan target pekerjaan pembangunan Desa

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kemampuan Pemerintah Desa dalam menyelesaikan target yang telah ditentukan dalam pembangunan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari Pemerintah Desa telah menempatkan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Desa beserta jajarannya saling berkomunikasi untuk mencapai target pembangunan yang telah ditentukan.

Menurut Seraya (2009:1) menyatakan bahwa “target merupakan suatu perencanaan kegiatan yang ingin dicapai, suatu metode penerapan pencapaian perencanaan yang dilakukan dengan manajemen dan difokuskan pada hasil yang lebih maksimal”. Dengan demikian maka hasil penelitian diatas sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Seraya (2009:1). Hal ini terlihat dari Pemerintah Desa Sindangsari dapat menyelesaikan target pembangunan

Desa sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dengan adanya target kerja yang jelas Pemerintah Desa Sindangsari dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, sehingga Pemerintah Desa Sindangsari memiliki patokan waktu secara terperinci kapan pekerjaan tersebut harus mulai dikerjakan dan diselesaikan.

b. Kemampuan Pemerintah Desa dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan manajemen waktu yang telah ditentukan

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa belum mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan kurangnya partisipasi dari masyarakat dan keterbatasan ahli dalam bidang pembangunan di Desa Sindangsari yang menyebabkan melebihi target pembangunan yang telah ditentukan.

Menurut Abdillah et.al. (2020) menyatakan bahwa “Manajemen waktu diartikan dengan perencanaan, proses atau tindakan yang telah ditentukan untuk melakukan suatu kegiatan dalam ukuran waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efektif, efisien dan produktif. Lebih jauh dikatakan bahwa manajemen waktu didalamnya berupa pengelolaan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan produktivitas terhadap waktu”. Dengan demikian maka hasil penelitian di atas belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Abdillah et.al. (2020).

Hambatannya dapat dilihat dari

kurangnya partisipasi dari masyarakat dan kurangnya tenaga ahli dalam bidang pembangunan, sehingga menyebabkan manajemen waktu yang telah ditentukan oleh Pemerintah Desa terkadang melebihi batas yang telah direncanakan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu Pemerintah Desa mengajak dan mensoialisasika terhadap masyarakat terkait pentingnya partisipasi masyarakat terhadap program pemangunan Desa dan Pemerintah Desa tidak hanya mengandalkan pengerjaan pembangunan terhadap masyarakatnya saja, namun Pemerintah Desa juga bisa mencari tukang bangunan dari masyarakat luar yang lebih ahli dalam pembangunan yang, agar pembangunan yang sedangdilaksanakan dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2. Kualitas Layanan

a. Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat merasa puas terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan. Pemerintah Desa pun melayani masyarakat dengan respon yang cepat. Menurut Pasalong (2021:124) mengemukakan kepuasan pelayanan yaitu “hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan aparatur penyelenggara pelayanan publik.”

Dengan demikian maka hasil penelitian di atas diketahui bahwa indikator dalam kepuasan masyarakat

terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dapat dikatakan sudah baik sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Harbani Pasalong, hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian penulis bahwa Pemerintah Desa selalu merespon dengan cepat dan bersikap baik dalam melayani masyarakat. Pemerintah yang baik dalam pelayanan sikap dan juga hasil pekerjaan tentunya akan lebih disukai oleh masyarakat karena kebutuhan yang diinginkan tercapai sesuai dengan harapan masyarakat.

b. Pemerintah Desa melayani aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa melayani dan menampung berbagai aspirasi dari masyarakat dengan cepat, tepat, ramah, dan kecakapan Pemerintah Desa dalam melayani yang sudah baik. Setiap aspirasi ditampung Pemerintah Desa setiap 6 tahun satu kali saat penyusunan RPJM dan dipecah menjadi RKP tahunan.

Kemudian hasil penelitian dari hasil wawancara dan dari hasil observasi dapat dinyatakan bahwa Pemerintah Desa melayani aspirasi masyarakat sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari Pemerintah Desa melayani dan merespon dengan baik juga cepat terhadap masyarakat yang akan memberikan aspirasi. Meskipun terkadang aspirasi tersebut dapat di realisasikan dengan cepat ataupun tidak.

Menurut Kasmir (Pasalong, 2019:153) mengatakan bahwa “pelayanan yang baik adalah

kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang telah ditentukan”.

Di Desa Sindangsari pelayanannya dapat dikatakan sudah baik dilihat dari Pemerintah Desa melayani dengan ramah terhadap penampungan aspirasi dari masyarakat. Dan yang paling penting dari tingkat kepuasan masyarakat yang baik terhadap kualitas pelayanan.

3. Responsivitas

a. Kemampuan Pemerintah Desa dalam menerima dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa sudah mampu menerima dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat cukup baik, hal ini dapat dilihat dari Pemerintah Desa telah Menyusun rencana pembangunan yang akan dilakukan disetiap tahunnya. Selain menerima dan merealisasikan aspirasi msyarakat Pemerintah Desa Sindangsari berinisiatif untuk mengadakan pertemuan-pertemuan di Kantor Desa Sindangsari, untuk membicarakan permasalahan dan menggali aspirasi atau kebutuhan yang di inginkan oleh masyarakat di Desa Sindangsari untuk diusulkan kedalam program pembangunan Desa. Aspirasi yang sudah disampaikan akan ditampung oleh Pemerintah Desa.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa mampu menerima dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat dengan baik.

Pemerintah Desa memiliki kebijakan-kebijakan sendiri dalam menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat, artinya Pemerintah Desa menyadari bahwa pembangunan fisik itu tidak dapat terwujud tanpa adanya kerjasama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat.

b. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat terhadap hasil kerja yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil penelitian masyarakat merasa kurang puas terhadap hasil kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun kebelakang, hal ini dikarenakan kurangnya kualitas pengaspalan jalan yang menyebabkan jalan tidak tahan lama, tidak seperti jalan-jalan yang lainnya. Maka dapat diketahui bahwa indikator responsivitas mengenai kemampuan Pemerintah Desa dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat terhadap hasil kerja yang telah dilakukan dapat dikatakan belum baik.

Menurut Atmaja (Kurniawan et al., 2018:51) mengemukakan bahwa “kepuasan masyarakat yaitu perasaan senang atau kecewa seseorang yang dihasilkan dari membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan produk atau layanan jasa dengan harapan”. Dengan demikian maka hasil penelitian diatas belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Atmaja (Kurniawan et al., 2018:51) dan teori diatas, dapat diketahui bahwa pentingnya kepuasan masyarakat terhadap hasil kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, hal ini dapat menimbulkan rasa senang dan aktifitas masyarakat pun dapat

berjalan dengan baik.

Hambatannya dapat dilihat dari kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pengaspalan jalan Desa yang dilakukan kurang dari 3 tahun yang lalu kini sudah rusak kembali, banyaknya lubang di jalan dapat menghambat aktifitas masyarakat. Sejalan dengan pernyataan tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang telah dijelaskan yaitu untuk kedepannya dalam pengaspalan jalan tidak hanya di tambal dibagian yang berlubang saja, namun juga keseluruhan jalan di perbaiki dengan aspal hotmix guna dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama.

4. Responsibilitas

a. Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Desa bertanggung jawab dengan baik dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas yang sudah dipercayakan kepada masing-masing bagian dalam unsur Pemerintah Desa yang dibebankan sebagai wujud tanggung jawab untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dipercayakan kepada setiap Pemerintah Desa.

Menurut Mustari (2011:21) mengenai ”bertanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya) Negara dan Tuhan”.

Dengan demikian, maka hasil penelitian diatas sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mustari (2011;21). Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa Pemerintah Desa sudah bertanggung jawab dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah dipercayakan kepada masing-masing bagian dalam unsur Pemerintah Desa yang dibebankan sebagai wujud tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dipercayakan kepada setiap Pemerintah Desa. Pemerintah Desa pun memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan suatu kegiatan karena dengan cara ini tidak akan terjadi tumpang tindih masalah tanggung jawab yang sudah dibebankan kepada Pemerintah Desa.

b. Pemerintah Desa mengawasi secara rutin dalam pelaksanaan program pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, memang Pemerintah Desa selalu mengawasi secara rutin terhadap program pembangunan yang sedang dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari Pemerintah Desa selalu mendokumentasikan setiap pekerjaan pembangunan yang sedang dilakukan mulai dari 0% sampai dengan 100%.

Menurut Siagian (2004:40) "Mengawasi berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional dilapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sementara kegiatan operasional sedang berlangsung maksudnya ialah

untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya".

Dengan demikian, maka hasil penelitian diatas sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siagian (2004:40), hal ini dapat dilihat dari Pemerintah Desa Sindangsari selalu melakukan pengawasan dan memantau terhadappekerjaan pembangunan fisik yang sedang berlangsung. Pemerintah Desa selalu mendokumentasikan pekerjaan pembangunan mulai dari 0% hingga 100% yang menjadi bukti bahwa program pembangunan yang sedang dilakukan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Pemerintah Desa juga mengawasi sendiri kegiatan pembangunan, apabila ada ketidak sesuaian dengan apa yang telah direncanakan Pemerintah Desa menegur pekerja agar pembangunan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan.

5. Akuntabilitas

a. Pelaksanaan kerja dilakukan secara transparansi oleh Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Sindangsari telah melakukan tugasnya dengan baik, hal ini dapat dilihat dari Pemerintah Desa selalu memberikan ruang terhadap masyarakat sehingga masyarakat ikut berperan dalam musyawarah terbuka terhadappembangunan Desa, kemudian Pemerintah Desa selalu membuatpapan nama dalam setiap pemangunan atau prasasti yang bertuliskan keterangan pembangunan, keudian memasang

banner hasil kerja yang telah dilakukan selama satu tahun sebagai bukti transparansi terhadap masyarakat.

Menurut Wulandari dan Handayani (2019:201) mengemukakan bahwa “Transparansi merupakan keterbukaan informasi yang mudah dipahami masyarakat, adanya publikasi mengenai detail anggaran Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan anggaran kepada masyarakat, atau dengan kata lain transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keinginannya terhadap jalannya Pemerintah di Daerah mereka sendiri untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat”.

Berdasarkan teori di atas dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Sindangsari sudah melakukan transparansi terhadap masyarakat di setiap tahunnya. Dengan demikian, transparansi juga memiliki hubungan yang erat dengan kinerja yang tanpa adanya keterbukaan, maka kinerja Pemerintah tidak dapat berjalan dengan maksimal. Transparansi yaitu salah satu faktor pendukung terpenting dalam meningkatkan kinerja Pemerintah. Transparansi diterapkan bukan semata-mata untuk memberikan akses informasi terhadap kinerja Pemerintah saja, namun keterbukaan dalam pengelolaan keuangan juga harus diperhatikan.

b. Laporan pelaksanaan kerja Pemerintah Desa dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian

Pemerintah Desa melakukan laporan pertanggung jawaban (LPJ) dengan baik, yang merupakan mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan fisik di Desa yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Dipertanggung jawabkan yang dimaksud yaitu memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan pembangunan fisik yang disampaikan secara lisan maupun secara tulisan. Pemerintah Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan laporan pembangunan fisik di Desa kepada Bupati melalui Camat, dan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada BPD. BPD pun dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan pertanggung jawaban terhadap Pemerintah Desa.

Menurut Azhar (139:2023) mengenai “laporan pelaksanaan (*Performance Report*) adalah sebuah laporan yang umumnya disajikan setiap bulan dan mengikuti bentuk yang sudah distandarisir yang dirancang secara khusus untuk mempermudah manajemen melakukan pengendalian intern”. Maka penulis dapat menyimpulkan dari teori di atas bahwa dalam indikator Pemerintah Desa melakukan laporan pertanggung jawaban sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari Pemerintah Desa Sindangsari telah melakukan tugasnya sesuai dengan kewajibannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Pemerintah Desa dalam program

pembangunan fisik di Desa Sindangsari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dinyatakan belum optimal, hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator kinerja yang belum berjalan dengan efektif memenuhi kinerja Pemerintah Desa dalam program pembangunan fisik.

Dimensi-dimensi yang dianggap belum optimal yaitu produktivitas, dimana Pemerintah Desa dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan manajemen waktu yang telah ditentukan belum berjalan baik, hal ini dilihat karena kurangnya sosialisasi Pemerintah Desa mengenai pentingnya partisipasi dan gotong royong masyarakat terhadap pembangunan yang akan dilakukan. Upaya yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Desa, sehingga manajemen waktu yang di buat dapat terlaksana dengan baik sesuai waktu yang telah ditentukan. Kemudian dimensi responsivitas, dilihat dari indikator mengenai Pemerintah Desa memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat terhadap hasil kerja yang telah dilakukan,

sebagian masyarakat kurang puas terhadap hasil kerja Pemerintah Desa, hal ini juga dapat dilihat dari permasalahan yang ada yaitu perbaikan jalan yang dilakukan kurang dari 3 tahun yang lalu kini sudah rusak kembali yang dapat menghambat aktivitas masyarakat. Maka untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu Pemerintah Desa melakukan

pengaspalan jalan tidak hanya di tambal dibagian yang berlubang saja, namun keseluruhan jalan di perbaiki dengan aspal hotmix guna dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdillah, Et Al. 2020. Human Capital Management. Yayasan Kita Menulis.

Affandi.Azhar (2023) Penganggaran bisnis teori dan praktik. Cipta Media Nusantara (CMN); Surabaya

Pasalong, Harbani. (2019). *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.

Pasalong, Harbani. (2021). *Etika Profesi*, Yogyakarta: CV. Nas Media Pustaka.

Siagian, Sondang P (2004) *Administrasi Pembangunan, Gedung Agung, Jakarta. Sijunjung Dalam Angka*, 2015

Jurnal-Jurnal

Lestari, PA (2018). Korelasi antara motivasi belajar dan sikap tanggung jawab dengan hasil belajar IPA. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan* , 2 (2), 176-181.

Muliawati, D. (2022). Kinerja Pemerintah Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

Putra, HR, Pebrianto, Y., & Sudrartono, T. (2022).

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Kantor Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. *Jurnal Studi Manajemen dan Kewirausahaan (MSEJ)* , 3 (4), 1984-1903.

Sari, ADP (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Dan Motivasi Kerja Terhadap Aparatur Pemerintah Desa (Studi Empiris Pada Desa Se- Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar). *ECOUNTBIS: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis* , 2 (1), 86-96.

Wahidaty, H. (2021). Manajemen waktu: Dari teori menuju kesadaran diri peserta didik. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* , 3 (4), 1880-1889.

Yulinda, M. (2013). Analisis Efektivitas Pengawasan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Pada Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Tembilahan (Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

Undang-Undang

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa